

BAB IV

ANALISIS RESOLUSI JIHAD NU DAN PEMBENTUKAN NASIONALISME INDONESIA DITINJAU DARI KONTEKS FIQH SIYASAH

A. Analisis Resolusi Jihad NU Dalam Pembentukan Nasionalisme Indonesia

Jihad adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan manusia. Namun sesuatu yang tidak disukai itu terdapat kebaikan yang tidak diketahui manusia. Sebaliknya, sesuatu yang disenangi manusia ternyata membawa petaka bagi kehidupan mereka. Jihad hanya dibolehkan dalam situasi yang sangat terpaksa. Islam adalah agama perdamaian dan berusaha membawa manusia ke dalam kedamaian, dan kesejahteraan. Namun Kalau umat Islam diperangi, maka umat Islam tidak boleh tinggal diam. Umat Islam wajib bangkit bangkit membela diri menghadapi musuh.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah Ibn Abi Awfa, Nabi menyatakan “Janganlah kalian berharap bertemu musuh, dan berdoalah kepada Allah untuk perdamaian. Namun bila kalian bertemu musuh hadapilah dengan kesabaran”. Hadist ini menunjukkan damai adalah prinsip utama dalam Islam. Peperangan dalam Islam bukanlah untuk tujuan *ofensif*, melainkan

defensif. Para ulama sepakat bahwa jihad perlawanan (*Jihad defensif*) untuk menghadapi atau mengusir penjajah serta membebaskan negeri dan penduduk Islam dari penjajahan adalah fardlu 'ain. Dan ini tidak ada perselisihan, yang menjadi perselisihan adalah jihad Fadlu Kifayah yaitu jihad penyerangan (*Jihad Ofensif*).¹

Dalam awal kehadirannya, NU mengarahkan perjuangannya kepada dua sasaran, yang Salah satunya adalah untuk melawan kolonialisme Belanda. Ketika melihat ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia, maka pada tanggal 22 Oktober 1945 NU mengeluarkan keputusan fatwa jihad (Resolusi jihad NU) untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.² Dengan demikian, dalam konteks Resolusi Jihad NU menurut pandangan penulis merupakan Jihad perlawanan atau jihad *Defensif*,³ dimana jihad perlawanan (*Jihad Defensif*) menurut para ulama hukumnya fardlu 'ain. Dikeluarkannya fatwa resolusi jihad oleh NU Menurut pandangan penulis karena situasi dan kondisi Indonesia pada waktu itu diserang dan dijajah oleh tentara sekutu (Inggris dan terasuk Belanda). Dan jika dianalisis, resolusi jihad NU yang dipaham keputusan jihad oleh NU, menurut penulis karena beberapa faktor:

Pertama, karena faktor pemaksaan yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia untuk menyembah selain Allah, dimana ketika itu Jepang

¹ Yudus Qardhawi, *Fiqh Jihad*, (Bandung: Mizan, 2010), 250.34.

² Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2010), 17.

³ Yudus Qardhawi, *Fiqh Jihad*, 5.

mewajibkan agar bangsa Indonesia mengikuti pendewaan terhadap kaisar Jepang Tenno Haika dengan cara membungkukkan badan ke arah timur pada waktu-waktu tertentu, NU langsung menyatakan penolakannya. Seperti juga semua orang Islam, pendewaan kepada selain Allah, dipandang sebagai perbuatan syirik oleh NU.⁴

Kedua, karena faktor bangsa Indonesia diserang atau di jajah oleh Belanda (untuk kedua kalinya setelah Jepang kalah dengan tentara sekutu). Setelah berjuang ratusan tahun melawan kolonialisme, Indonesia dengan tegas menyatakan kemerdekaannya setelah Soekarno-Hatta membacakan naskah proklamasi Republik Indonesia. Namun, kemerdekaan itu tidak berlangsung lama. Pada tanggal 15 September 1945, tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam AFNEI (*Allied Forces Netherland East Indies*) untuk melucuti tentara Jepang yang sudah kalah perang. Tentara Inggris membawa misi titipan untuk mengembalikan Indonesia kepada pemerintah Belanda sebagai jajahan Hindia Belanda.⁵

Ketiga, karena faktor pemimpin negara meminta bantuan untuk berperang. Dimana ditengah-tengah kebingungan Presiden Soekarno untuk melawan kekuatan militer sekutu, atas saran Panglima Jenderal Soedirman, Soekarno mengirim utusan khusus kepada Roisul Akbar Nahdlatul Ulama (NU) Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari di Pondok pesantren Tebuireng Jombang

⁴ Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, 15.

⁵ Zainal Munasichin, *Rosolusi Jihad NU Sejarah Yang Dilupakan*, (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, 2011), 12.

Jawa Timur, untuk meminta mengkaji hukumnya berperang membela Negara menurut ajaran Islam.⁶

Keempat, karena faktor perjuangan NU untuk melawan kolonialisme Belanda.⁷ dimana dalam awal kehadirannya, NU mengarahkan perjuangannya kepada dua sasaran. Salah satunya untuk melawan kolonialisme Belanda. Perjuangan tersebut berhasil membentuk kiyai dan santri menjadi lapisan masyarakat bangsa Indonesia yang sangat anti penjajah. Sikap anti penjajah ini memberikan sumbangan yang besar pada perjuangan menuju Indonesia merdeka.⁸

Resolusi jihad NU tersebut diadakan kembali pada Mukhtamar di Yogyakarta pada tanggal 7-8 November 1945,⁹ Untuk melawan penjajah Dan dampak dari keputusan resolusi jihad NU tersebut sangat besar terhadap nasionalisme rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah. Hampir seluruh daerah Jawa-Madura dan kota lainnya, di pondok-pondok pesantren telah berubah menjadi markas Hizbullah dan Sabilillah. Resolusi jihad NU ini menjadi salah satu sumber inspirasi dan motivasi terhadap ribuan pemuda Islam yang tergabung dalam lasykar-lasykar rakyat yang melibatkan diri dalam pertempuran heroik, di antaranya adalah 10 November 1945 di Surabaya, Palagan Ambarawa, Bandung

⁶ *Ibid.*, 14.

⁷ Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, 12.

⁸ *Ibid.*, 12-13.

⁹ Ahmad Mansyur Suryanegara, *Apa Sesudah NU Balik Kanan Ke Khittah 1926? Dalam Bunga Rampai NU Menggugat Khittah NU Oleh Drs. H.A. Nasir yusuf*, (Bandung :Humaniora Utama Press, Cet. I, 1994), 29-30.

Lautan Api, pertempuran Semarang, Sumatera Barat (perlawanan Ulama aceh), Sumatera Timur (Medan), dan sebagainya,¹⁰ sehingga Indonesia merdeka. Seandainya resolusi jihad tidak ada, laskar Hizbullah dan Sabilillah bersama laskar rakyat lain tidak lahir untuk menentang sekutu, mungkinkah Indonesia merdeka dan bisa kita nikmati sampai hari ini?.¹¹

B. Analisis Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Resolusi Jihad NU dalam

Pembentukan Nasionalisme Indonesia

Gagasan nasionalisme, selama dekade awal abad 20, merupakan fokus perdebatan politik yang paling seru di dunia Islam. Dalam Islam ada konsep nasionalisme sebagaimana dipahami konstruksi pengertian ala barat. Namun nilai-nilai nasionalisme yang ada dalam Islam terfragmentasi dalam istilah *ummah*, *syu'b*, dan *qawn*. Isma'il Raji al-Faruqi mengatakan, nasionalisme memandang "lokalitas", "suku" atau "masyarakat" sebagai tujuan akhir, dan juga kesejahteraan setempat merupakan ukuran puncak kebaikan perilaku politik, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian Islam hanya mengenal *ummah*. Karena *ummah* terdiri dari orang-orang yang bersatu di bawah sistem nilai tauhid, meskipun secara faktual mereka mempresentasikan banyak perbedaan ras, suku,

¹⁰ Slamet Efendi dkk, *Dinamika Kaum Santri Menelusuri Jejak Pergolakan Internal NU*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), 38-39.

¹¹ Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, 100.

warna kulit dan bahasa.¹² Sungguh menarik apabila membahas gagasan Nasionalisme NU, karena selama ini NU dikenal sebagai organisasi masyarakat Islam berwatak kebangsaan. Watak kebangsaan tersebut melekat pada sejarah dan jati diri NU.¹³ Jiwa kebangsaan NU mengacu pada kekayaan sejarah dan budaya Nusantara.¹⁴

Awal abad ke-20, sebelum tergabung dalam Jam'iyah NU, para ulama sudah merasakan denyut kebangkitan nasional. Ketika pemerintah Hindia Belanda memulai politik etis, dan putra-putri Hindia Belanda (Indonesia) mulai sadar akan keterbelakangan yang menindas saudara sebangsanya. Maka pelan-pelan tumbuh organisasi pergerakan, baik dalam skala sempit, lokal-kedaerahan, maupun bersifat keagamaan. Di pusaran arus dinamika lahirnya organisasi-organisasi yang menjamur tersebut, NU masih eksis dan semakin dinamis dalam memberikan kontribusi terhadap perjuangan di tanah air. Bahkan saat kesadaran kaum cendekiawan masih elitis dalam mendirikan organisasi, ulama-ulama pesantren tradisional telah lebih dahulu memiliki kesadaran nasionalis yang melampaui kepentingan-kepentingan primordial (kedaerahan).

NU yang berdiri dengan embrionya *Nahdlatul Wathan, Tashwirul Afkar, Nahdlatul Tujjar*, dan *Nahdlatul Wathan*, yang berarti “kebangkitan tanah air” dengan sendirinya mengungkapkan, bahwa NU mempunyai nasionalisme yang

¹² Abdul Fattah, *Kewargaan Dalam Islam: Tafsir Baru Tentang Konsep Umat*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Agama Dan Masyarakat (LPAM). Cet.I, 2004), 143-144.

¹³ Setiawan, *Nasionalisme NU*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2007), 1-2.

¹⁴ Setiawan, *Nasionalisme NU*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2007), 3.

sangat tinggi demi kebangkitan seluruh bangsa tanah air.¹⁵ Oleh karena itu dalam konteks nasionalisme Indonesia, para kiai mengembalikan konsep nasionalisme ini pada realitas keterlibatan para pendiri NU dalam proses berbangsa dan bernegara mulai zaman penjajahan sampai sekarang. Terkait dengan ini Hasymi Arkhas menjelaskan bahwa pada masa pra-kemerdekaan, para kiai sudah memperlihatkan rasa nasionalisme dengan berbagai bukti sejarah, yaitu:

1. Sikap non-kooperasi dengan penjajah.
2. Menolak perintah Belanda untuk masuk *Staat Van orlog Bleg* (SOB), sebuah intruksi yang mirip dengan wajib militer.
3. Menjadi anggota tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang menjadi cikal-bakal TNI.
4. Gigih melakukan perlawanan terhadap penjajah secara kultural. Para kiai bahkan sampai mengharamkan orang Islam menggunakan celana dan dasi karena hal itu menyerupai tradisi orang Belanda.
5. Ikut merumuskan piagam Jakarta dan Pancasila yang direpresentasikan oleh KH. A. Wahid Hasyim.¹⁶

Setelah masa kemerdekaan, para kiai sangat intensif menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara dengan berbagai cara, yaitu:

1. Pada 22 Oktober 1945 mengeluarkan fatwa “perang suci” (jihad) melawan tentara sekutu dan belanda yang menyerang kota Surabaya.

¹⁵ Setiawan, *Nasionalisme NU*, 130.

¹⁶ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, (Yogyakarta: LkiS. Cet 1. 2007), 243.

2. Konsisten dengan bentuk Negara Pancasila sehingga memandang Negara Islam (*Dar Al-Islam*) sebagai tidak sah dan Kartosuwiryo dinyatakan sebagai pemberontak (*Bughat*).
3. Memberi gelar kepada Soekarno sebagai *Wali Al-Arm Adh-Dharuri Bi Asy-Syaukah*. Esensi gelar ini adalah pernyataan sahnya Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia secara darurat, walaupun tanpa melalui pemilu.
4. Bersedia duduk dalam cabinet NASAKOM.
5. Pada 1 Oktober 1965 menuntut pemerintah agar membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan menyatakannya sebagai partai terlarang.
6. Memplopori penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua ORMAS, yang diputuskan dalam musyawarah Nasional (MUNAS) Alim Ulama NU tahun 1983 di Situbondo Jawa Timur.¹⁷

Menurut penelitian Ziemek, para pejuang kemerdekaan yang kaum penjajah adalah para kiai, yang merasa mendapat ilham dan terpanggil memprakarsai dan memimpin perlawanan. Bruinessen juga menyatakan bahwa menurut penyelidikan yang lebih seksama, tidak sedikit pemimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda adalah para kiai dan Haji. KH. Saifuddin Zuhri menjelaskan bahwa pada 1935, NU mendesak MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia) untuk bersama GAPPI (Gabungan Partai Politik Indonesia) meningkatkan tuntutan "Indonesia berparlemen" kepada pemerintah Hindia

¹⁷ *Ibid.*, 244.

Belanda dan pemerintah Belanda di Den Haag. Akan tetapi, pada waktu itu tuntutan tersebut ditolak oleh Belanda.¹⁸

Para kiai juga telah melancarkan perlawanan terhadap Ordonansi yang ditetapkan oleh Belanda terhadap haji yang bermukim di Mekah. Mereka harus membayar pajak haji. Para kiai NU yang sedang bermuktamar di Cirebon Jawa Barat pada tahun 1938 memutuskan bahwa Belanda harus mencabut keputusan tersebut dan membebaskan Jama'ah haji dari keharusan membayar pajak. Dan Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia, para kiai telah mengeluarkan fatwa “perang Suci” (*Resolusi Jihad*) melawan Inggris dan Belanda. Fatwa tersebutlah yang mendorong rakyat Surabaya pada khususnya dan masyarakat daerah tanah air Indonesia umumnya untuk aktif dalam perlawanan terhadap penjajah.

Dari uraian di atas membuktikan bahwa peranan para kiai dalam masa perjuangan nasional sangat besar dalam mengatarkan Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan. Semangat kebangsaan (Nasionalisme) NU itu tidak bisa lepas dari landasan perjuangannya kepada dasar teori politiknya sebagaimana politik Sunni. yaitu:

1. Prinsip Ketuhanan, prinsip ketuhanan dalam kehidupan politik merupakan suatu yang mutlak bagi NU. Bentuk Negara bagi NU tidak harus Islam, yang penting dalam perjalanan Negara harus mencerminkan substansi ajaran Islam,

¹⁸ Ibid., 113-114.

yaitu nilai-nilai universal dari ajaran Islam seperti keadilan, kemakmuran, kejujuran, maupun kebebasan dalam menjalankan ibadah dan ritual keagamaan dapat berjalan dengan baik. Kekuasaan dan kewenangan Negara (pemerintah) selain mengandung amanat rakyat juga mengandung amanat ketuhanan. Oleh karena itu pemerintahan Negara dilaksanakan sesuai dengan tuntutan moral keagamaan yang berorientasi pada kemaslahatan umum.

2. Prinsip Musyawarah, mekanisme perjalanan roda pemerintahan harus mengedepankan tentang prinsip musyawarah (*Al-Syura*). Ketika berbicara mengenai pergantian kepemimpinan, maka yang menjadi dasar paling utama adalah peran rakyat atau *Ahl Syura*.
3. Prinsip Keadilan, keadilan merupakan salah satu tema penting dalam ajaran Islam. NU menjadikan keadilan sebagai salah satu prinsip yang selalu dipegang teguh dan dilaksanakan dalam setiap langkah yang diambil. Keadilan bagi NU bukan saja merupakan intisari ajaran Islam yang harus diamalkan, namun juga dapat menjadi spirit yang utama dalam rangka membangun Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera secara merata.
4. Prinsip Kebebasan, prinsip kebebasan bagi NU diartikan sebagai suatu jaminan setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara yang baik, bertanggung jawab dan perilaku yang mulia (*Al-Akhlaqal Karimah*). Dalam konteks bangsa Indonesia yang bersifat pluralistik, prinsip kebebasan perlu dijunjung tinggi, sehingga setiap individu maupun kelompok dapat

menjalankan aktivitasnya masing-masing dengan tenang dan rasa aman. Untuk itu diperlukan saling menghormati terhadap segala bentuk perbedaan yang ada.¹⁹

5. Prinsip Kesetaraan, NU memiliki pandangan yang inklusif dan substantif terhadap realitas masyarakat Indonesia yang plural. Bagi NU keragaman suku, ras, agama, budaya, maupun perbedaan pendapat dan golongan merupakan suatu keniscayaan. Pluralitas merupakan rahmat yang harus dihadapi dengan sikap membuka diri, saling menghormati dan menjalin kerjasama dengan menghilangkan sikap eksklusif. Prinsip kesetaraan menurut NU adalah suatu pandangan bahwa setiap orang atau individu mempunyai kedudukan yang sama tanpa adanya segala bentuk diskriminatif.

Dan Ijtihad politik kenegaraan NU selalu mengacu kepada kaidah Fiqh, kaidah Fiqh tersebut adalah:²⁰

i. *درء المفسد سد مقدم من جلب المصالح*

Menghindari kerusakan harus didahulukan atas melaksanakan kebaikan.

ii. *إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما*

*Apa bila terjadi pertentangan antara dua mafsadah (kerusakan), maka harus dipertimbangkan bahaya yang lebih besar, dengan menjalankan resiko yang lebih kecil.*²¹

¹⁹ *Ibid.*, 111.

²⁰ M. Mansyur Amin, *NU & Ijtihad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta: Al-Amien Presss, 1996 Cet.1), 90.

iii. مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

Kewajiban yang tidak lengkap kecuali dengan syarat tertentu maka syarat itu menjadi wajib.

iv. مالا يدرك كله لا يترك كله

Apa yang tidak diperoleh semuanya jangan ditinggalkan semuanya.

v. الا شياء اذا اتسعت ضاقت

Apabila keadaan sempit lapangkanlah, apabila keadaan lapang sempitkanlah

vi. المحافضة على القديم الصالح والاخذ بالجديد الاصلح

Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik.²²

vii. الضرورات تبيح المحظورات

Kesulitan memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang